

Presensi/Reviewer : Fika Hakim.,SH.,LL.M
Tebal Buku : 315 halaman
Bahasa : Inggris
Pengarang : Prof.Dr.H.Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.,
C.IISL, D.IAA., FellBis., LAA., FCIArb., FHKrb.,
FCBArb
Penerbit : PT Fikahati Aneska



Dalam Hukum Romawi dikenal maxim '*Cujus est Solum est esque ad coelum*' yang artinya barang siapa memiliki sebidang tanah baik perorangan maupun negara maka hak pemilikan itu berlaku bukan saja terhadap apa yang ada di atas permukaan tanah, akan tetapi juga terhadap apa yang ada di dalam tanah dan di atasnya tanpa batas ('*ad infinitum*', *up to sky*').

Perkembangan dan pelaksanaan azas tersebut tidak pernah mengalami kesulitan sampai manusia mulai menggunakan ruang udara bagi kegiatan-kegiatan penerbangan. Negara-negara mulai menyadari akan hak-hak kedaulatannya di ruang udara. Maka sejak tahun 1911, banyak negara-negara yang memasukkan hak kedaulatan ini kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dan mengatur segala bentuk penerbangan di ruang udara.

Di awal Perang Dunia ke-1 negara-negara netral melarang segala bentuk penerbangan oleh negara-negara asing, terutama pihak yang berperang ke daerah ruang udara di atas wilayah negaranya. Dengan latar belakang ini, dalam Konvensi Paris 1919 untuk pertama kalinya hak-hak kedaulatan negara di ruang udara dicantumkan dalam suatu konvensi, walaupun sebelumnya, hak-hak kedaulatan negara tersebut merupakan kebiasaan hukum internasional. Tetapi

dalam kenyataannya didalam Konvensi Paris itu hanya ada pengakuan hak-hak bagi negara-negara anggota dan negara-negara yang telah menang perang saja sedangkan bagi negara-negara yang netral dan kalah Perang Dunia ke-1 tidak diakui hak-haknya. Akhirnya, atas usulan beberapa negara bukan anggota konvensi, pada tahun 1929 diadakan pertemuan untuk mengamandemen Konvensi Paris 1919. Amandemen yang diberlakukan antara lain adalah mengakui hak kedaulatan negara di ruang udara bagi setiap negara tanpa perbedaan serta pengakuan terhadap hak lintas damai dengan beberapa pembatasan.

Pada tahun 1944, dibuat Konvensi baru yang dinamakan Konvensi Chicago. Pasal 1 Konvensi Chicago juga mencantumkan hak-hak kedaulatan negara di ruang udara. Penegasan yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Chicago ini berbunyi sebagai berikut : *"The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory"*. Namun, pada kenyataannya penegasan ini menimbulkan keraguan dan berbagai sengketa, terutama diantara Negara-negara yang teknologi penerbangannya sudah maju. Pokok utama perselisihan paham ini disebabkan tidak adanya penjelasan dalam konvensi mengenai maksud dan batas-batas ruang udara.

Penulis berpendapat bahwa persoalan kedaulatan seharusnya dikaitkan dengan suatu analisa tentang mata rantai yang terdiri dari aspek-aspek politik, ekonomi dan hukum udara. Penulis menjabarkan bahwa timbulnya persoalan dan sengketa di sekitar kedaulatan negara disebabkan oleh tiga hal, yaitu tidak adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama Konvensi Chicago 1944 yang menjelaskan mengenai batas ruang udara. Selain itu, Outer Space Treaty 1967, mengenai pengaturan tentang penggunaan ruang angkasa, tidak menjelaskan batas-batas mulainya ruang angkasa. Konvensi Chicago 1944 juga tidak pernah memberikan klasifikasi tentang istilah pesawat udara.

Sesuai dengan pasal 1 Konvensi Chicago, disimpulkan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang mutlak atas jalur ruang udara di atas wilayahnya dan tidak dapat dikurangi lagi oleh negara lainnya. Tidak adanya ketentuan mengenai batas jalur ruang udara ini, penulis berpendapat perlu untuk meneliti sampai dimana batas-batas kedaulatan negara di ruang udara. Pendapat ini bersumber dari doktrin klasik bahwa hak dan kewajiban suatu negara untuk melindungi dirinya. Perlindungan ini dianggap wajar apabila negara yang

bersangkutan mempunyai hak-hak atas ruang udara yang berada di atasnya. Suatu hak kedaulatan menimbulkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengawasan yang efektif terutama dari segi hidup bernegara internasional.

Permasalahan-permasalahan yang diulas dalam buku ini diantaranya yaitu, perlukah ditetapkan batas-batas kedaulatan Negara di ruang udara di wilayah Negara-negara? Apabila hal tersebut dinilai perlu, maka mungkinkah ditetapkan batas kedaulatan di ruang udara? Bagaimana caranya ? perlukah mengembangkan teori nusantara yang pantas untuk memperoleh pengertian dan pengakuan internasional ?

Dalam pembatasan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis pertama-tama menguraikan batasan, ruang lingkup serta hubungan Hukum Angkasa dengan bidang-bidang ilmu lain. Pada bab selanjutnya, penulis mengetengahkan secara khusus dan membahas mengenai perkembangan kedaulatan Negara di ruang udara sejak zaman hukun Romawi. Selanjutnya penulis meneliti pengaruh-pengaruh azas yang telah ada tersebut terhadap berbagai undang-undang nasional.

Buku ini terdiri dari 5 Bab. Bab I mengenai permasalahan, bab II mengenai peristilahan, ruang lingkup dan hubungan dengan bidang-bidang ilmu lain, bab III mengenai perkembangan konsep kedaulatan Negara di ruang udara sampai dengan masa di sekitar tahun 1929, bab IV mengenai masa setelah konvensi Chicago 1944, bab V mengenai analisa dan kesimpulan.

Lampiran-lampiran yang terdapat dalam buku ini diantaranya *Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation (Paris Convention 1919)* bersama protokolnya, *Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 1944)*, *Treaty on Principles Concerning The Activities of States in the Exploration and use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies*, Istilah Pesawat Udara Menurut UU Penerbangan Nasional Berbagai Negara, Pengaturan Nasional Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Klasifikasi Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Penerbangan Nasional di Berbagai Negara, dan Undang-Undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan.